



Tunjungan Plaza

Selalu Berinovasi dan Kreasi Baru

TUNJUNGAN Plaza Mall (TP) merupakan salah satu mal terbesar di Surabaya. Keberadaannya menjadi salah satu destinasi atau jujukan, tidak hanya bagi warga kota Surabaya saja melainkan juga warga luar kota.

Selain bangunannya yang luas dan lengkap, pelayanan yang diberikan anak perusahaan Pakuwon Group ini juga maksimal. Sehingga tidak heran jika mal yang berada di Jalan Tunjungan ini tidak pernah absen menjadi nominator WOW Surabaya Service Excelent Award yang diadakan oleh Markplus.Inc.

Direktur Pemasaran Pakuwon Group, Sutandi Purnomosidi mengatakan, penghargaan tersebut diperoleh lantaran pihak manajemen tidak pernah lelah untuk selalu meningkatkan dan memperbaiki segala kekurangan pelayanan. Selain itu pihaknya juga selalu menciptakan berbagai inovasi dan kreasi baru untuk para customer.

"Namun yang terpenting adalah pelayanan maksimal kepada para customer," ungkapnya saat ditemui di Food Junction, Jumat (18/8).

Sutandi menyebutkan beberapa konsep baru diantaranya adalah *shopping attendance*. Yakni konsep baru yang dilakukan oleh Tunjungan Plaza Mall untuk membuat nyaman para pengunjung ketika baru masuk mal.

Menurutnya jika di mal lain, ketika datang pengun-



IKON SURABAYA: Tunjungan plaza, tempat berbelanja yang lengkap sekaligus tempat rekreasi keluarga yang nyaman.

jung langsung dihadapkan pada sekuriti. Namun di Tunjungan Plaza pengunjung akan dimanjakan penyambutan para wanita cantik dan ramah.

"Mereka yang akan menyambut pengunjung ketika baru masuk mal. Tidak hanya itu, mereka juga mengetahui semua informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung," lanjut Sutandi.

Selain itu, beberapa inovasi yang juga mendukung

kenyamanan pengunjung adalah kelengkapan fasilitas. Menurut Sutandi, di Tunjungan Plaza saat ini sudah tersedia ruang khusus anak.

Selain itu, bentuk fasilitas yang terus di-improve adalah mushola. Selain kebersihan, alat-alat ibadah yang disediakan sangat baik dan dijamin bersih.

"Sebab seperti mukenah, kami selalu ganti setiap hari," lanjut pria berkaca-

mata ini.

Dia melanjutkan, service vital lain adalah membuat nyaman mungkin toilet yang ada di Tunjungan Plaza Mall. Mulai dari kebersihan hingga bau toilet yang selalu *fresh*. Tidak hanya itu, di mal ini juga terdapat toilet khusus anak-anak.

"Kami buat senyaman mungkin sehingga customer semakin betah saat berada di mal ini," jelasnya.

Selain *good service*, untuk

mendapatkan atensi customer, manajemen Tunjungan Plaza Mall selalu memanfaatkan momen. Sutandi mencontohkan, seperti saat bulan puasa dan lebaran, pihaknya membuat konsep Tunjungan Plaza dengan nuansa timur tengah.

"Namun kedepan konsep ini akan kami terapkan di salah satu bangunan Tunjungan Plaza. Sehingga nantinya ada perbedaan antara TP 1 hingga TP 5, nanti-

nya akan kami buat lebih spesifik," jelasnya.

Tidak hanya itu, untuk menyedot pengunjung, pihak Tunjungan Plaza juga seringkali mendatangkan *live show* karakter atau tokoh kartun anak. Sebab menurut Sutandi, kebanyakan customer yang datang ke mal merupakan keluarga. Namun jangan khawatir, untuk para orang tua dan pengunjung dewasa juga diapresiasi dengan adanya bonus, voucher serta poin bagi para member.

"Sehingga setiap member ini melakukan pembelian, mereka akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah," tegas Sutandi.

Menurut Sutandi, beberapa konsep dan inovasi tersebut diperoleh setelah pihaknya selalu memposisikan diri sebagai seorang customer. (yua/nur)

SUTANDI PURNOMOSIDI

Direktur Pemasaran Pakuwon Group



DPRD Desak Penyerahan Draft Perda OPD



MOLOR: Perda OPD yang harus disusun Pemkot Surabaya berkaitan dengan urusan dalam hal melakukan mutasi dan pemilihan kepala daerah definitif, namun hingga saat ini draft perda tersebut masih belum sampai di meja anggota legislatif.

Pembahasan APBD 2017 Molor

KONDISI belum adanya Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini selain membuat proses mutasi dan pemilihan kepala daerah definitif menjadi molor, juga berpengaruh pada penyusunan APBD kota Surabaya tahun 2017. Pasalnya gara-gara belum ada perda OPD ini, maka dewan juga tidak bisa membahas anggaran murni APBD 2017.

"Seharusnya yang dilakukan pembahasan APBD tahun 2017 dulu. Baru setelah itu dilakukan pembahasan untuk APBD perubahan 2016," ulas Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha.

Namun hingga kini pembahasan perda OPD bahkan belum dimulai, maka pem-

ba-hasan APBD 2017 ini dimundurkan dan mendahulukan APBDP 2016. Menurut Politisi PKB ini, hal ini tidak apa-apa dilakukan, sebab beberapa daerah juga melakukan hal yang sama.

Akan tetapi secara khusus Masduki belum tahu apa sanksi yang diberikan pemerintah pusat akibat molornya pembahasan APBD 2017 dan molornya pembahasan perda OPD.

"Tapi khusus untuk APBD 2017 nanti kita tetap komitmen untuk menyelesaikan pada bulan November. Kalau nggak akan ada sanksi bagi kepala daerah dan DPRD, yaitu tidak akan mendapat gaji enam bulan," tegas Masduki. (ima/nur)



MASDUKI TOHA
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya



RATIH RETNOWATI
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

SURABAYA—Usai membahas RPJMD, salah satu rekomendasi dari DPRD adalah pemerintah kota segera membuat Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Memasuki minggu keempat di bulan Agustus, hingga saat ini draft perda tersebut masih belum sampai di meja anggota legislatif.

Oleh sebab itu saat ini dewan mendorong agar pemkot segera membuat draft perda tersebut agar segera bisa dilakukan pembahasan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Ratih Retnowati mengatakan, penyelesaian perda ini sangat mendesak. Sebab berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, perda tersebut seharusnya sudah digedok maksimal akhir bulan Agustus 2016. Jika tidak akan ada dampak terhadap jalannya pemerintahan di Kota Pahlawan.

"Terkait perda ini kita akan segera membuat pansus. Akan tetapi hingga saat ini draft raperda itu belum juga masuk ke kami. Lalu bagaimana bisa kami bahas," tandas Politisi Partai Demokrat ini.

Ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi titik berat pasca diterbitkannya perda ini. Yang pertama adalah penataan organisasi tata laksana di Pemkot Surabaya. Yang kemudian akan membuat kepala daerah bisa melakukan mutasi setelah perda digedok.

Lebih lanjut, Ratih menuturkan bahwa pihaknya sudah berbicara dengan pemkot. Termasuk sekda dan beberapa kepala SKPD. Dari informasi yang didapat belum selesainya draft raperda ini karena dari pusat memang belum ada keputusan untuk hasil perombakan organisasi untuk Pemkot Surabaya. Apakah akan dilakukan perampingan atau tidak ada perampingan.

"Dari substansinya, kami

setuju bahwa tidak ada perangkat SKPD yang digabung. Seperti DPUCKTR, dan juga DPUBMP. Bahkan di daerah lain itu Satpol PP dan Linmas juga sudah ada penggabungan," ulas Ratih.

Namun menurutnya lantaran Kota Surabaya ini kota yang unik dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka tentu harus ada diskresi.

Dimana tidak semua organisasi pemkot harus linier dengan kementerian di atasnya sehingga ada perampingan dan penyesuaian.

Justu menurut Ratih yang disebut penyesuaian yang tepat adalah organisasi pemerintah daerah harusnya disesuaikan dengan kondisi, tugas, dan ranah urusan yang ditangani.

"Kota Surabaya ini kota yang besar. Dan tidak bisa kalau semua dijadikan satu, justru akan susah jika SKPD bekerja dengan tugas yang sangat besar, takutnya malah keteteran," ulasnya.

Kecuali untuk bidang urusan yang memang di Surabaya tingkatanya tidak banyak di Surabaya. seperti urusan kehutanan atau pertanian. Kondisi SKPD itu bisa digabungkan saja.

Jika perda ini kelar maka wali kota bisa melakukan mutasi. Kondisi keperluan mutasi ini pun terbilang urgent.

Sebab cukup banyak SKPD yang sudah dipimpin pelaksana tugas dalam jangka waktu yang sangat lama. Seperti DPUCKTR, Dinas Perhubungan, dan juga Dirut RSUD Seewandhie.

"Makanya kami mendesak agar perda ini diselesaikan. Sebab kalau terlalu lama dipenggal kepala dinas yang non definitif pemerintahan akan mandek lantaran kebijakan strategis tidak bisa diambil oleh decision maker," pungkas Ratih. (ima/nur)